

Pemkab Buton Selatan
Gunakan APBD untuk
Membantu Kebutuhan Sekolah
Anak Keluarga Miskin,
La Bariu: Seragam hingga Tas
Sekolah Segera Disalurkan



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program tersebut diprioritaskan bagi siswa yang paling membutuhkan berdasarkan usulan dan pendataan sekolah, dengan penyaluran direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.

tober 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan, La Bariu, S.Pd., mengatakan pengadaan bantuan telah selesai dan kini tinggal menunggu penyaluran. Paket bantuan mencakup seragam sekolah, dasi, topi, kaus kaki, sepatu, dan tas untuk menunjang kebutuhan belajar siswa. “Dari rekapitulasi data yang dikirim sekolah-sekolah, itulah kami belanja, kemudian kami kirim sesuai

Lanjut ke Hal: 7

Baubau Job Fair 2026 Catat 325 Lamaran dalam Dua Hari,
16 Perusahaan Berpartisipasi, tersedia 737 Lowongan Kerja



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Baubau Job Fair 2026 mencatat 325 lamaran kerja yang masuk selama dua hari pelaksanaan, 12-13 Oktober 2026, di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan

Lanjut ke Hal: 7

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Apresiasi Warga Bone-Bone yang Konsisten Melestarikan Haroana Andala, Tradisi Pesisir Baubau yang Menjaga Warisan Leluhur

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Ritual adat Haroana Andala di Kelurahan Bone-Bone, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu upaya masyarakat pesisir mempertahankan warisan budaya sekaligus memperkuat identitas daerah. Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mengapresiasi konsistensi warga menyelenggarakan tradisi tahunan tersebut yang sarat makna spiritual, rasa



syukur, dan harapan atas keselamatan para nelayan.

Apresiasi itu disampaikan Yusran saat menghadiri

pelaksanaan Haroana

Lanjut ke Hal: 7

Wali Kota Yusran Fahim Umumkan 10 Proyek Strategis Tahun 2026
Pada Sidang Paripurna DPRD Peringati HUT Baubau ke-485,
IPM Baubau Capai 80,29

10 PROYEK STRATEGIS TAHUN 2026	CAPAAN PEMBANGUNAN BAUBAU	CAPAAN LAINNYA
1 Rekonstruksi Jalan Kompleks Lowu-Lowu	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2006: 70,60 → 2025: 80,29	Opini WTP Dari BPK RI atas laporan keuangan 2025 Ke-11 kali berturut-turut
2 Rekonstruksi Jalan Kompleks Sulaa Tahap II	Tingkat Kemiskinan 2006: 18,90% → 2025: 6,83%	Bantuan rumah swadaya 600 unit (alokasi 2026) 287 unit terealisasi hingga semester I
3 Rekonstruksi Jalan Dr. Wahidin	Tingkat Pengangguran Terbuka 2006: 14,44% → 2025: 3,95%	Pembangunan Sekolah Rakyat Lahan 6 hektare di Kelurahan Palabusa
4 Rekonstruksi Jalan Maasiaja	PDRB atas dasar harga berlaku 2001: Rp349 miliar → 2025: Rp12,97 triliun	Dukungan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat
5 Penataan Kawasan Lakologou Tahap II	Pertumbuhan Ekonomi Semester I 2026: 5,58%	
6 Penataan Kawasan Lembah Hijau		
7 Revitalisasi Pasar Wameo		
8 Revitalisasi Pasar Kotamara		
9 Pemasangan jaringan perpipaan jalur khusus Pertamina		
10 Pembangunan Puskesmas Waborobo dan Puskesmas Lakologou		

Laporan: Prasetyo M/Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menetapkan 10 proyek strategis pada 2026 untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program tersebut dipaparkan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Baubau, Kamis (15/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Baubau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom.

Sepuluh proyek itu mencakup rekonstruksi Jalan Kompleks Lowu-Lowu, Jalan Kompleks Sulaa Tahap II, Jalan Dr. Wahidin, dan Jalan Maasiaja; penataan Kawasan Lakologou Tahap II dan Lembah Hijau; revitalisasi Pasar Wameo dan Kotamara; pemasangan jaringan perpipaan jal-

Lanjut ke Hal: 7

Tinjau SD Negeri 1 Gu, Bupati Buton Tengah
Dr Azhari Soroti Pemerataan Fasilitas Pendidikan, Apresiasi Dukungan Pusat untuk Revitalisasi 66 Sekolah



Laporan: Firman

BUTON TENGAH, BP- Sebanyak 66 sekolah di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, memperoleh alokasi program revitalisasi pada Tahun Anggaran 2026. Program yang mencakup jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) itu mendapat apresiasi Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, karena dinilai membantu pemerintah daerah

meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di tengah penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Apresiasi tersebut disampaikan Azhari saat meninjau pelaksanaan program revitalisasi di SD Negeri 1 Gu, Desa Walando, Kecamatan Gu, Kamis (15/10/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara, Irene Irawati Arsanti, Sekretaris Dinas Pendidikan Buton Tengah, serta

Kepala Desa Walando. Azhari menilai dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memperluas pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke wilayah pedesaan. Sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pembenahan sarana sekolah tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran daerah.

Lanjut ke Hal: 7

DPR Usulkan Skema Gaji PNS Lewat Kopdes, Bank Daerah Tetap Dilibatkan



Ilustrasi. Sejumlah Aparatur Sipil Negara saat mengikuti apel

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP-Rencana pemerintah menyalurkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendapat perhatian Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Kar-sayuda mengusulkan agar penyaluran gaji aparatur pemerintah pusat dan daerah dibedakan untuk menjaga keberlangsungan bank pembangunan daerah (BPD) sekaligus membuka ruang bagi koperasi.

Rifqinizamy mengusulkan gaji PNS di lingkungan pemerintah pusat dapat disalurkan melalui KDKMP. Sementara itu, gaji PNS di daerah tetap dibayarkan melalui bank daerah, yang dapat bekerja sama dengan koperasi setempat. Menurut dia, skema tersebut memungkinkan koperasi terlibat dalam aktivitas ekonomi lokal tanpa mengabaikan peran perbankan milik pemerintah daerah.

Kekhawatiran utama berkaitan dengan potensi perpindahan dana murah yang selama ini menopang kegiatan usaha bank daerah. Rifqinizamy menyebut sekitar 70 persen dana murah bank daerah berpotensi bergeser apabila mekanisme peng-gajian dialihkan. Ia memperingatkan, perubahan tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap keberlangsungan sejumlah bank daerah.

“Hal ini tentu membuat dana murah yang ada di bank-bank daerah sejumlah rata-rata 70% akan bergeser dan itu akan membuat banyak bank daerah kita kolaps di Indonesia,” kata Rifqinizamy kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Selain menghimpun dana, bank daerah selama ini menjadi salah satu penyedia kredit bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebagian kewajiban kredit aparatur dibayarkan melalui mekanisme pemotongan otomatis atau autodebet dari rekening penerima gaji. Karena itu, perubahan jalur pembayaran gaji perlu memperhitungkan kesinambungan pembayaran cicilan dan hubungan antara nasabah dengan bank pemberi kredit.

Rifqinizamy mengatakan, Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda), yang menghimpun bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia, turut mengkhawatirkan perpindahan dana dan transaksi penggajian ke Him-punan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menilai, kebijakan pemerintah perlu dirancang agar perluasan peran koperasi tidak mengganggu ekosistem keuangan daerah.

“Inilah yang saya kira perlu mendapat perhatian kita, hal-hal teknis tetapi kemudian jangan sampai kebijakan negara yang satu

mematikan kemudian ekosistem negara yang lain,” ujar politikus Partai NasDem tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah telah mengajukan usulan pembayaran gaji PNS melalui KDKMP kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pelaksanaannya dengan target penerapan pada 2026. Pernyataan itu disampaikan Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Ketika ditanya apakah pembayaran melalui koperasi dimulai pada 2027 atau tahun ini, Ferry menjawab, “Sekarang.” Namun, pemerintah belum menjelaskan secara terperinci jadwal pembayaran pertama, tata cara penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam program tersebut.

Dalam konteks nasional, koperasi memiliki landasan historis dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan asas kekeluargaan dalam penyusunan perekonomian nasional. Sementara itu, bank pembangunan daerah berkembang sebagai lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan dan aktivitas ekonomi di

daerah. Kedua institusi tersebut memiliki karakter dan fungsi yang berbeda sehingga pembagian peran menjadi salah satu persoalan penting dalam rencana kebijakan ini.

Pengalaman internasional juga memperlihatkan bahwa koperasi keuangan telah berkembang selama lebih dari satu abad. Menurut World Council of Credit Unions, gerakan koperasi kredit modern berakar di Eropa pada abad ke-19, termasuk inisiatif Friedrich Wilhelm Raiffeisen di pedesaan Jerman. Organisasi internasional tersebut kemudian resmi dibentuk pada 1970 dan mulai beroperasi pada 1971 untuk mendukung perkembangan koperasi kredit lintas negara.

Dalam perkembangannya, koperasi keuangan di berbagai negara turut memperluas akses masyarakat terhadap layanan simpanan, pinjaman, dan pembayaran. Namun, pengalaman tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan pada penyaluran gaji aparatur di Indonesia karena perbedaan regulasi, tata kelola, kapasitas lembaga, dan sistem pembayaran. Karena itu, rincian mekanisme, pengamanan transaksi, serta hubungan kerja sama antara KDKMP dan bank daerah akan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan rencana pemerintah tersebut. (*)

Prabowo Tugaskan Menkum Pangkas Regulasi, 195 Permenkum Disederhanakan



Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Kementerian Hukum menyederhanakan 195 Peraturan Menteri Hukum menjadi 34 peraturan sebagai bagian dari penataan regulasi nasional. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk memangkas aturan yang berbelit-belit dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Supratman mengungkapkan arahan itu dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pemerintah, menurut dia, ingin memastikan regulasi mendukung pembangunan, bukan justru menambah beban administrasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Arahan Bapak Presiden jelas: Sederhanakan regulasi! Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat oleh aturan dan prosedur yang berbelit-belit,” kata Supratman.

Sepanjang 2026, Kementerian Hukum mencatat 970 permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan 10.300 permohonan di tingkat daerah. Data tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan koordinasi dalam penyusunan regulasi agar aturan di berbagai tingkatan tidak saling bertentangan.

Kementerian Hukum juga mencatat 10.278.423 kali akses terhadap 697.325 dokumen. Sementara itu, kegiatan expose review atau pemaparan hasil penelaahan

peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebanyak 1.176 kali hingga Oktober 2026.

Supratman mengatakan pemerintah telah meninjau peraturan yang tidak lagi diperlukan dan menyederhanakan sejumlah proses perizinan. Namun, keberhasilan deregulasi tidak semata-mata ditentukan oleh berkurangnya jumlah aturan, melainkan juga oleh dampaknya terhadap kepastian hukum dan kualitas pelayanan.

“Penyederhanaan peraturan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan regulasi harus memberikan manfaat terukur, antara lain mengurangi beban dan biaya masyarakat serta pelaku usaha, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperkuat kepastian hukum.

Karena itu, proses perencanaan, pembentukan, peman-tauan, dan evaluasi peraturan perlu terhubung satu sama lain. Supratman mengingatkan bahwa deregulasi bukan sekadar mengganti aturan lama dengan aturan baru yang memiliki substansi serupa, tetapi mem-butuhkan ketuntasan agar lebih sederhana, selaras, dan tidak menghambat pembangunan.

Secara historis, agenda penyederhanaan regulasi di Indonesia telah mengemuka melalui berbagai upaya reformasi birokrasi dan perizinan. Salah satu tonggak penting

nya ialah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menggunakan pendekatan omnibus law untuk mengubah sejumlah ketentuan lintas sektor. Undang-undang tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 setelah melalui proses hukum dan pembentukan peraturan lanjutan.

Di tingkat internasional, penyederhanaan regulasi juga menjadi bagian dari agenda reformasi pemerintahan dan peningkatan kualitas tata kelola. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), misalnya, mengembangkan prinsip kebijakan regulasi yang menekankan penilaian dampak, konsultasi publik, serta evaluasi aturan agar kebijakan lebih efektif dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa deregulasi perlu disertai pengawasan kualitas, bukan sekadar pengurangan jumlah peraturan.

Supratman menegaskan, transformasi tata kelola hukum harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan layanan, pemanfaatan data, serta pemantauan dan evaluasi. Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa perubahan aturan benar-benar meningkatkan kualitas hukum dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat maupun dunia usaha. (*)

Tiga Pimpinan Penegak Hukum Pusat Bahas KUHP-KUHAP Baru di Sultra, Gubernur ASR: Perda Perlu Diselaraskan



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan

keberhasilan implementasi KUHP dan KUHAP yang baru harus tercermin dalam penegakan hukum yang profesional, konsisten, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur ASR saat menerima kunjungan kerja tiga pimpinan lembaga penegak hukum pusat dalam rangka penguatan sinergi dan pemantauan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru di Provinsi Sultra, di Hotel Claro Kendari, Selasa (13/10/2026).

Ketiga pejabat tersebut yakni Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Dr. Wahyu Hadiningrat, Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Dr. Dwiarto Budi Santiarto.

Gubernur ASR menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab bersama dalam memastikan pembaruan hukum pidana nasional dapat diterapkan secara terkoordinasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan implementasi

KUHP dan KUHAP baru tidak cukup hanya diukur dari kemampuan melaksanakan ketentuan normatif. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dalam praktik penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat.

Gubernur menjelaskan, Sultra memiliki karakteristik geografis yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan, dengan aktivitas ekonomi serta dinamika sosial kemasyarakatan yang terus berkembang. Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum yang baik.

Karena itu, penerapan KUHP dan KUHAP baru perlu memperhatikan kondisi objektif daerah dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, serta pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Gubernur ASR juga menekankan pentingnya penyaluran peraturan daerah (Perda) yang memuat ketentuan pidana, baik yang masih berlaku maupun yang sedang dalam pembahasan, agar tetap sejalan dengan perkembangan hukum nasional.

Upaya tersebut, lanjutnya, membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Hukum, dan unsur masyarakat, terutama ketika kebij-

kan pemerintah daerah bersinggungan dengan pelaksanaan ketentuan pidana.

Gubernur juga menegaskan bahwa sinergi antarlembaga tidak berarti mencampurkan kewenangan.

Sebaliknya, kerja sama perlu dibangun dengan tetap menghormati independensi setiap lembaga dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana memaparkan capaian penerapan mekanisme baru, khususnya plea bargain atau pengakuan bersalah di Sultra. Berdasarkan catatan Kejaksaan Agung hingga 30 September 2026, terdapat 11 pengajuan mekanisme tersebut dan seluruhnya disetujui oleh pengadilan negeri setempat.

“Sebelas-sebelasnya disetujui oleh pengadilan negeri setempat,” ujarnya

Wakil Jaksa Agung RI menilai, capaian tersebut menunjukkan koordinasi antaraparatur penegak hukum di Sultra mulai berjalan baik dalam menerapkan mekanisme baru. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi sejak tahap penyidikan agar jaksa dan penyidik dapat menyamakan pemahaman mengenai konstruksi perkara, penerapan pasal, dan kebutuhan alat bukti.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat menekankan pentingnya pergeseran

pendekatan penegakan hukum dari crime control model menuju due process model, dengan proses yang efektif, berbasis fakta dan alat bukti, serta tetap memperhatikan hak-hak setiap pihak yang berhadapan dengan hukum.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi personel melalui sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pelatihan penyidik untuk mendukung penerapan aturan baru secara konsisten dan berbasis penyelidikan ilmiah atau scientific investigation.

Adapun Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Dwiarto Budi Santiarto menjelaskan sejumlah kebijakan Mahkamah Agung dalam membantu hakim menghadapi masa transisi penerapan aturan baru, termasuk pedoman penanganan perkara, kasasi, prapradilan, dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, disampaikan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana persidangan elektronik serta kesamaan pemahaman antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan pihak berperkara untuk mencegah perbedaan penafsiran terhadap ketentuan baru.

Paparan ketiga pimpinan lembaga tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga dalam mengawal penerapan KUHP dan KUHAP yang baru, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. (*)

Revitalisasi Lakidende Dimulai, Pemprov Sultra Siapkan Rp35 Miliar pada 2026



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai merevitalisasi Kawasan Olahraga Terpadu Lakidende di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan anggaran Rp35 miliar pada tahap pertama tahun 2026. Proyek ini mencakup rehabilitasi fasilitas olahraga yang sudah ada serta pembangunan sejumlah sarana baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga yang representatif.

Kawasan tersebut dirancang memiliki beragam fasilitas, mulai dari lintasan jogging, lapangan padel, lapangan tenis dalam ruangan, hingga fasilitas panjat dinding. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pusat kuliner, plaza, dan area pelataran untuk menunjang aktivitas masyarakat di kawasan olahraga terpadu tersebut.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka meninjau lokasi proyek pada Senin (12/10/2026) sore, bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan bersama atau Mutual Check 0 (MC-0). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan perencanaan pekerjaan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.

Pekerjaan fisik dijadwalkan dimulai pada Selasa (13/10/2026), dengan target penyelesaian sekitar 2,5 bulan. Pelaksanaan proyek ditangani PT Borian-dy Putra. Pembenahan kawasan direncanakan berlangsung dalam dua

tahap, yakni melalui tahun anggaran 2026 dan dilanjutkan pada 2027.

Pada tahap pertama, pemerintah akan merehabilitasi Gedung KONI, lapangan mini soccer, lapangan basket, kolam renang, dan lapangan softball. Pembangunan fasilitas baru meliputi lintasan jogging, lapangan golf untuk latihan pukulan (driving range), pusat kuliner (food court), lapangan tenis dalam ruangan, lapangan padel, plaza, area pelataran, serta fasilitas panjat dinding (wall climbing).

Adapun tahap kedua pada 2027 direncanakan mencakup pembangunan gerbang dan papan nama kawasan, jalan akses ke seluruh area, tribun lapangan basket, lapangan voli, serta arena skateboard (skatepark). Fasilitas lain yang masuk dalam rencana ialah sarana menembak (shooting range), panahan (archery), musala, area bermain anak, dan kolam retensi.

Gubernur Andi Sumangerukka menyatakan kawasan tersebut diharapkan dapat langsung digunakan masyarakat setelah seluruh pekerjaan dan fasilitas pendukung selesai. “Apabila seluruh fasilitas dan sarana olahraga ini telah rampung, kawasan tersebut dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Revitalisasi Lakidende menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki kualitas sarana publik dan mendorong masyarakat lebih aktif berolahraga. Keberadaan fasilitas yang beragam diharapkan

dapat mengakomodasi kegiatan kebugaran, rekreasi keluarga, serta aktivitas olahraga bagi berbagai kelompok usia.

Secara historis, pembangunan fasilitas olahraga publik juga menjadi bagian dari kebijakan perkotaan di berbagai negara. Di Indonesia, penyediaan sarana olahraga masyarakat memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mengatur penyelenggaraan keolahragaan, termasuk pembinaan dan pengembangan olahraga serta dukungan prasarana dan sarana.

Pada tingkat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030 pada 2018. Dokumen tersebut mendorong penciptaan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik, termasuk tersedianya ruang publik yang aman dan mudah diakses. Kerangka kebijakan ini relevan sebagai konteks bagi pengembangan kawasan olahraga Lakidende, meskipun tidak secara langsung menjadi dasar khusus proyek tersebut.

Dengan anggaran tahap pertama Rp35 miliar pada 2026 dan rencana kelanjutan pada 2027, pembenahan Lakidende diharapkan menghadirkan kawasan olahraga yang lebih lengkap bagi warga Kendari dan sekitarnya. Realisasi manfaatnya akan bergantung pada penyelesaian pekerjaan sesuai target, kualitas fasilitas, serta pengelolaan dan pemeliharaan kawasan setelah dibuka untuk umum. (*)

Bupati Azhari Dampingi Tim JAM-Intel, Persiapan Pembangunan SNT Buton Tengah Dimatangkan, Ditarget Mulai 2027



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dengan menyiapkan lahan hibah masyarakat seluas 21 hektare di Desa Katukobari/Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah. Bersama Tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI, Bupati Buton Tengah Dr. Azhari meninjau kesiapan lokasi pada Rabu (14/10/2026), sebagai bagian dari tahapan menuju pembangunan fisik yang direncanakan mulai 2027.

Pemerintah daerah menargetkan perencanaan pembangunan sekolah tersebut rampung pada 2026. Selain memastikan kesiapan lahan, Pemkab Buton Tengah mempercepat pembangunan akses jalan menuju kawasan SNT agar infrastruktur pendukung tersedia sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.

Dalam reviu tersebut, Tim JAM-Intel bersama Bupati Azhari memeriksa kondisi lahan, aksesibilitas, serta aspek teknis dan lingkungan. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya me-

mastikan lokasi yang disiapkan memenuhi kebutuhan awal pembangunan fasilitas pendidikan terintegrasi.

“Perencanaan pembangunan SNT ditargetkan rampung tahun ini, sedangkan pembangunan fisiknya direncanakan mulai tahun depan,” demikian penjelasan mengenai tahapan pembangunan yang disampaikan Bupati Azhari dalam keterangan terkait agenda tersebut.

Kesiapan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pembukaan dan pembangunan akses menuju kawasan SNT ditargetkan selesai pada 2026. Setelah pekerjaan itu rampung, Pemkab Buton Tengah akan mengusulkan pengaspalan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Selain meninjau lokasi pembangunan permanen, Tim JAM-Intel dan Pemkab Buton Tengah mengunjungi Kampus B Universitas Sembilanbelas November (USN) Buton Tengah. Kampus tersebut dipersiapkan sebagai lokasi sementara untuk mendukung kegiatan SNT selama gedung permanen ma-

sih dalam tahap pembangunan.

Reviu itu melibatkan sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD). Camat Mawasangka Tengah, unsur Polri, dan kepala desa juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Penyiapan SNT di Buton Tengah berlangsung dalam konteks kebutuhan nasional untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana belajar. Dalam pembangunan fasilitas pendidikan, ketersediaan lahan, akses transportasi, kelayakan lingkungan, dan kesiapan infrastruktur menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan sebelum konstruksi dimulai.

Secara historis, pembangunan pendidikan di Indonesia telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional sejak awal kemerdekaan. Konstitusi melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Amanat tersebut menjadi landasan bagi berbagai upaya memperluas layanan pendidikan di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan dan kawasan yang akses infrastrukturnya masih perlu ditingkatkan.

Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menetapkan Tujuan 4, yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Agenda global yang diadopsi pada 2015 itu menempatkan akses terhadap pendidikan bermutu sebagai salah satu unsur penting pembangunan berkelanjutan.

Dengan target perencanaan rampung pada 2026 dan pembangunan fisik dimulai pada 2027, Pemkab Buton Tengah kini memusatkan persiapan pada kepastian lahan, kesiapan lokasi sementara, dan pembangunan akses jalan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan rencana pembangunan SNT dapat berlanjut ke pelaksanaan fisik sesuai jadwal yang ditetapkan.(*)

Hadiri Ramah Tamah HUT Baubau, Bupati Buton Alvin Akawijaya Dorong Kolaborasi Pembangunan Antardaerah



Laporan:La Harman

BAUBAU, BP- Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., menegaskan komitmen memperkuat kerja sama pembangunan dengan Pemerintah Kota Baubau untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Kepulauan Buton. Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian malam ramah tamah Hari Jadi Baubau ke-485 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Baubau sebagai daerah otonom di kawasan Kotamara, Sabtu malam (17/10/2026).

Menurut Alvin, kedekatan geografis antara Kabupaten Buton dan Kota Baubau diperkuat oleh hubungan sejarah serta kebudayaan yang telah terjalin sejak masa Kesultanan Buton. Karena itu, kolaborasi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di kawasan tersebut.

"Sebagai daerah tetangga sekaligus satu kesatuan kultur dan sejarah, Kabupaten Buton siap terus berkolaborasi dan berjalan berdampingan dengan Pemerintah Kota Baubau untuk mendorong kemajuan kawasan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton," ujar Alvin melalui pesan video pendek yang disampaikan dalam momentum perayaan tersebut.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Baubau

atas peringatan Hari Jadi ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Momentum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Malam ramah tamah itu dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, serta sejumlah pejabat dari wilayah Kepulauan Buton.

Sejumlah tokoh nasional dan perwakilan pemerintah turut hadir, antara lain Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, S.H., Anggota DPD RI Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, S.E., M.B.A., serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Dili, Timor-Leste, Prof. Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.

Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik HM Adios, S.Sos., serta Bupati Buton Selatan. Sejumlah perwakilan kepala daerah dan pejabat lainnya dari kawasan Kepulauan Buton juga menghadiri kegiatan tersebut.

Perayaan tahun ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Baubau yang diisi

dengan penutupan Baubau Expo, pameran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertunjukan seni budaya lokal, serta kegiatan syukuran bersama. Rangkaian acara tersebut turut menjadi ruang promosi produk lokal dan pelestarian kebudayaan daerah.

Dari sisi historis, Baubau dan wilayah Kabupaten Buton memiliki keterkaitan erat dengan Kesultanan Buton, sebuah kerajaan bercorak Islam yang berkembang di kawasan tersebut sejak abad ke-16. Warisan sejarah dan tradisi Kesultanan Buton hingga kini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Dalam konteks nasional, pelestarian warisan budaya daerah juga sejalan dengan semangat kebinekaan Indonesia, sedangkan pada tingkat global, pengakuan terhadap keragaman budaya menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya umat manusia.

Melalui momentum peringatan tersebut, hubungan antara Kabupaten Buton dan Kota Baubau diharapkan semakin kuat, tidak hanya dalam kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kerja sama konkret di bidang pembangunan, ekonomi masyarakat, dan pelestarian budaya. Sinergi antardaerah menjadi salah satu modal penting untuk mengoptimalkan potensi Kepulauan Buton sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.(*)

Digitalisasi Haji Diperkuat, 416 Ribu Data Jemaah Belum Padan



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Pemerintah memperkuat digitalisasi layanan haji melalui integrasi data kependudukan dan penataan tarif pemeriksaan kesehatan calon jemaah. Kesepakatan tiga kementerian yang ditandatangani di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (9/10/2026), tersebut ditujukan untuk mencegah manipulasi antrean, melindungi hak jemaah, dan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pembenahan administrasi menjadi mendesak setelah Kementerian Haji dan Umrah mencatat 416.147 dari sekitar 5,7 juta data jemaah dalam daftar tunggu belum padan dengan data kependudukan. Ketidaksesuaian ini berpotensi membuka celah percaloan, manipulasi usia, serta pemalsuan surat kematian untuk pelimpahan porsi secara ilegal dengan nilai yang dapat mencapai Rp500 juta.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sistem biometrik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencakup

98 persen penduduk. Teknologi pengenalan wajah, sidik jari, dan retina mata akan digunakan untuk memperkuat verifikasi identitas serta mempersulit penggunaan data orang lain dalam antrean haji. “Dengan hanya menampilkan wajah saja, kita sudah bisa mengetahui siapa orang tersebut: namanya, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, bahkan kerabatnya,” ujar Tito.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan yang melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kemendagri, serta Kementerian Haji dan Umrah. Menteri Haji dan Umrah Muchamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pepadanan data bersama Dukcapil bertujuan memastikan identitas jemaah valid dan hak mereka terlindungi.

Selain administrasi, pemerintah menata pembiayaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan usulan dua paket tarif pemeriksaan kesehatan atau medical check-up

(MCU), yakni Rp800.000-Rp1.000.000 untuk paket pertama dan Rp1.100.000-Rp1.300.000 untuk paket kedua. Usulan itu didasarkan pada kajian pembiayaan untuk mengurangi kesenjangan tarif antara rumah sakit daerah dan rumah sakit vertikal.

Dante menyoroti adanya biaya pemeriksaan yang mencapai Rp5 juta. Menurut dia, regulasi diperlukan agar tarif lebih terkendali dan pemeriksaan penunjang benar-benar relevan untuk menentukan istithaah atau kemampuan kesehatan calon jemaah menunaikan ibadah haji. “Kalau ada yang melakukan pemeriksaan sampai Rp5.000.000, itu tidak masuk akal,” katanya.

Kemkes juga mengusulkan tarif vaksinasi wajib meningitis sebesar Rp320.000â€¢Rp350.000 serta paket vaksinasi kombinasi dengan tarif hingga Rp850.000. Pada saat yang sama, Dante menyebut jumlah kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi turun dari 450 jiwa pada 2025 menjadi 340 jiwa pada 2026. Pemeriksaan terstandar dan pengetatan kriteria istithaah disebut sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan, meskipun data tersebut tidak membuktikan bahwa satu kebijakan menjadi satu-satunya penyebab penurunan.

Secara historis, Indonesia telah mengembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sejak 1996 untuk mendukung pengelolaan administrasi dan data jemaah. Di tingkat internasional, Arab Saudi meluncurkan platform Nusuk pada 2022 untuk mempermudah akses layanan haji dan umrah. Perkembangan tersebut memperlihatkan peran teknologi dalam mengelola perjalanan ibadah berskala besar, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada akurasi data, pengawasan, dan perlindungan informasi pribadi.

Melalui integrasi data biometrik dan standarisasi pemeriksaan kesehatan, pemerintah berharap pelayanan haji menjadi lebih tertib, terjangkau, dan akuntabel. Pembentukan tersebut dilakukan sembari menunggu penerbitan Keputusan Presiden mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Usulan tarif MCU dan vaksinasi dalam kebijakan ini belum dapat diperlakukan sebagai tarif resmi sebelum ditetapkan melalui ketentuan yang berlaku.(*)

Menkes Bidik Investasi Kesehatan, Peluang Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 8 Persen

Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Pemerintah mendorong investasi sektor kesehatan sebagai salah satu strategi memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan belanja kesehatan nasional sekitar 40 miliar dolar AS per tahun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melihat peluang pengembangan industri yang berpotensi tumbuh di atas 8 persen sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Peluang tersebut dibahas dalam KADIN Monthly Economic Diplomatic Breakfast (K-MEd) yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Pemerintah berharap keterlibatan investor dan mitra internasional dapat memperkuat industri kesehatan domestik, meningkatkan daya saing, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai sektor kesehatan dapat membantu Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 6 persen, 7 persen, hingga 8 persen. Karena itu, ia mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas diplomatik untuk mengoptimalkan peluang perdagangan serta investasi di sektor tersebut.

“Ketika kita berbicara tentang kesehatan, ini adalah sektor yang kami yakini dapat membantu Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 6 persen, 7 persen, hingga 8 persen,” ujar Anindya.

Budi mengatakan, potensi sektor kesehatan tidak hanya terletak pada penyediaan layanan medis, tetapi juga pada pengembangan industri farmasi, alat kesehatan, teknologi medis, dan riset. Menurut dia, peningkatan aktivitas ekonomi di bidang tersebut dapat memperbesar kontribusi sektor kesehatan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri nasional.

“Di sektor kesehatan itu opportunity-nya besar sekali. Itu salah satu sektor yang sebenarnya menjanjikan, bisa tumbuh di atas 8 persen, dan juga lapangan kerjanya bisa tumbuh di atas 8 persen,” kata Budi.

Ia memperkirakan, apabila tingkat belanja kesehatan Indonesia menyamai Malaysia, terdapat potensi tambahan belanja sekitar 84 miliar dolar AS. Jika

mencapai tingkat Singapura, potensinya disebut dapat mencapai 840 miliar dolar AS per tahun. Budi menegaskan bahwa sektor kesehatan perlu dipandang sebagai investasi strategis, bukan semata-mata beban anggaran. Angka perbandingan tersebut merupakan potensi yang disampaikan dalam bahan sumber dan memerlukan verifikasi atas dasar perhitungannya.

Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat industri kesehatan di dalam negeri. Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Krisis tersebut memperlihatkan risiko ketergantungan terhadap rantai pasok internasional ketika banyak negara membutuhkan obat, alat pelindung diri, dan perlengkapan medis secara bersamaan.

Dalam skala global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat belanja kesehatan dunia mencapai 9,8 triliun dolar AS pada 2021, setara dengan 10,3 persen produk domestik bruto global. Data historis itu menunjukkan besarnya posisi sektor kesehatan dalam perekonomian dunia, meskipun kesenjangan pembiayaan dan akses layanan antarnegara masih menjadi tantangan.

Selain mengupayakan investasi, Budi menyoroti pentingnya memperkuat representasi negara-negara Global South dalam organisasi internasional. Ia menyebut kelompok negara tersebut mencakup lebih dari 60 persen populasi dunia, tetapi suara dan keterwakilannya dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduknya.

“Pengalaman kita waktu pandemi, tidak mungkin ada satu negara yang bisa selamat sendiri. Karena secara global, delapan miliar orang ini sudah saling terhubung. Itu sebabnya kita harus merangkul semua menjadi satu,” ujar Budi.

Melalui forum K-MEd, pemerintah dan Kadin berupaya mempertemukan agenda pembangunan nasional dengan peluang kerja sama internasional. Keberhasilan strategi ini akan bergantung pada kemampuan Indonesia mengarahkan investasi untuk memperkuat produksi domestik, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau.(*)

PT FAREN GRAFIKA Harian Pagi Baubau Post KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Bencana Rp30,98 Miliar ke Pembelian Saham



Petugas menunjukkan barang bukti OTT korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan BNPB, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). KPK menyita barang bukti sekitar Rp5,47 miliar berupa uang tunai, valuta asing, emas dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) bencana BNPB, salah satunya adalah adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bima Setiawan.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga berkaitan dengan pembelian saham senilai Rp30,98 miliar. Kasus pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana tersebut menyeret lima tersangka, termasuk Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan dugaan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026). Penyidik menduga dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi melalui transaksi saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

“Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer),” kata Taufik.

KPK menyebut kepemilikan saham PT MDLA melalui PT

AVE mencapai sekitar 150,4 juta lembar atau 1,07 persen. Dengan harga Rp206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilai kepemilikan tersebut diperkirakan mencapai Rp30,98 miliar. Meski demikian, rincian transaksi dan hubungan kepemilikan saham tersebut perlu dicocokkan dengan dokumen penyidikan.

Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB terkait dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan bencana. Dana yang dipersoalkan antara lain diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.

Selain Bima, KPK menetapkan Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta, Gery Prasetyawan dan Syifa Nrika, sebagai tersangka. KPK menyatakan penahanan berlangsung selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.

Penyidik membuka perkara tersebut menjadi dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan langsung yang melibatkan Bima. Sejumlah

vendor penyedia barang dan jasa di lingkungan BNPB diduga terafiliasi dengannya. Klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemberian dan penerimaan imbalan atau fee dalam proyek pengadaan yang menggunakan anggaran darurat bencana.

Bima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Richard disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12 huruf i. Syifa dan Gery disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b maupun Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, Gabriel disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12B UU Tipikor. Rumusan pasal tersebut perlu diverifikasi berdasarkan dokumen resmi KPK.

Penguatan sistem penanggulangan bencana di Indonesia berkembang setelah gempa bumi dan tsunami Aceh pada 2004. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan membentuk BNPB melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Kebijakan tersebut memperkuat koordinasi penanganan bencana dan kebutuhan akan tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Siap Pakai disediakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana, antara lain evakuasi, logistik, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban. Kecepatan pengadaan sangat penting dalam situasi darurat, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk memastikan transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Pada tingkat internasional, Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan penguatan tata kelola risiko, investasi untuk ketahanan, dan peningkatan kesiapsiagaan. Kerangka ini memperlihatkan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efektif dan akuntabel untuk mengurangi dampak bencana.

KPK kini mendalami hubungan antara aliran dana pengadaan, perusahaan yang diduga terafiliasi dengan para tersangka, dan transaksi saham yang menjadi sorotan. Pembuktian perkara akan menentukan tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)

Polisi Tangkap Pria yang Diduga Lecehkan Siswi SD di Bekasi, CCTV Viral



Sosok pria viral begal payudara siswi SD di Bekasi setelah ditangkap polisi.

Laporan: Hadi

BEKASI, BP- Kepolisian menangkap DF (42), pria yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi kelas VI sekolah dasar (SD) di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Penangkapan dilakukan di wilayah Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Jumat (16/10/2026), setelah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan kejadian tersebut beredar luas di media sosial.

Kasus ini bermula ketika korban berjalan kaki sepulang sekolah pada Rabu (14/10/2026). Berdasarkan keterangan kepolisian, DF yang mengendarai sepeda motor diduga mendekati korban secara tiba-tiba, kemudian meraba bagian dada siswi tersebut.

Rekaman CCTV yang beredar di media sosial menjadi salah satu informasi yang ditindaklanjuti polisi. Setelah melakukan penyelidikan, aparat akhirnya mengamankan DF. Foto yang beredar memperlihatkan pria tersebut mengenakan kaus lengan panjang merah dan celana jins saat diamankan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota, Kopol Verdika Bagus Prasetya, mengatakan penangkapan itu merupakan hasil koordinasi antara Satuan Reserse Kriminal dan Polsek Bekasi Selatan.

“Setiap informasi mengenai dugaan tindak pidana kami

tindak lanjuti secara serius. Dalam perkara ini, koordinasi antara Satreskrim dan Polsek Bekasi Selatan membuahkan hasil dengan diamankannya terduga pelaku,” kata Verdika dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

DF selanjutnya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Penanganan perkara diserahkan kepada Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO) untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Verdika menegaskan, proses pembuktian harus dilakukan secara teliti agar rangkaian peristiwa dapat diungkap secara objektif dan dipertanggungjawabkan menurut hukum. Polisi belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan maupun keputusan hukum terhadap DF.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Kholis Aryana, menekankan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak harus mencakup perlindungan korban, bukan semata-mata penegakan hukum. Menurut dia, dugaan kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak psikologis sehingga keselamatan dan hak korban perlu menjadi perhatian selama proses penyidikan.

“Kehadiran Kepolisian bukan hanya untuk mengungkap dan memproses

dugaan tindak pidana, tetapi juga memastikan korban memperoleh rasa aman dan tidak mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung,” ujar Putu.

Dalam konteks nasional, perlindungan anak telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan tersebut memperkuat perlindungan anak dari kekerasan serta mendorong pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban.

Pada tingkat internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Prinsip ini menempatkan keselamatan, martabat, dan hak anak sebagai bagian penting dalam penanganan perkara.

Putu mengajak masyarakat melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindakan serupa. Ia juga mengingatkan agar identitas korban dirahasiakan untuk mencegah tekanan tambahan dan melindungi privasi anak selama proses hukum berlangsung.(*)

Wali Kota Yusran Fahim Umumkan 10 Proyek Strategis Tahun 2026 Pada Sidang Paripurna DPRD Peringati HUT Baubau ke-485, IPM Baubau Capai 80,29

Pertamina; serta pembangunan Puskesmas Waborobo dan Puskesmas Lakologou. Pemerintah berharap proyek-proyek tersebut memperbaiki konektivitas antarwilayah, kualitas fasilitas publik, dan akses pelayanan kesehatan. Revitalisasi Pasar Wameo, misalnya, diarahkan untuk menciptakan pusat perdagangan yang lebih bersih, higienis, modern, dan nyaman.

Di hadapan anggota DPRD, Yusran juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan. IPM Baubau meningkat dari 70,60 pada 2006 menjadi 80,29 pada 2025. Tingkat kemiskinan turun dari 18,90 persen menjadi 6,83 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berkurang dari 14,44 persen menjadi 3,95 persen dalam periode yang sama. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp349 miliar pada 2001 menjadi Rp12,97 triliun pada 2025, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen pada semester I 2026.

“Capaian tersebut merupakan bagian dari perjalanan pembangunan sejak Baubau menjadi daerah otonom pada 2001,” kata Yusran. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor perdagangan, jasa, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), in-

vestasi, serta ekonomi lokal agar Baubau semakin berperan sebagai pusat jasa dan perdagangan di kawasan Kepulauan Buton dan sekitarnya.

Pada bidang tata kelola keuangan, Baubau kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-11 secara berturut-turut. Pemerintah daerah juga memperoleh alokasi bantuan rumah swadaya sebanyak 600 unit pada 2026, dengan realisasi 287 unit hingga semester I. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan enam hektare di Kelurahan Palabusa didorong, bersamaan dengan dukungan terhadap pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Bangkit, Berbudaya dan Sejahtera”. Yusran menyebut momentum Hari Jadi Baubau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom harus menjadi ruang evaluasi pembangunan, bukan sekadar seremoni. Secara historis, status daerah otonom yang diperoleh Baubau pada 2001 menandai babak baru penyelenggaraan pemerintahan kota. Dalam konteks nasional, desentralisasi pascareformasi

juga memberi pemerintah daerah ruang lebih besar untuk mengelola pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Meski sejumlah indikator menunjukkan kemajuan, Yusran mengakui Baubau masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur dasar, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka statistik, tetapi harus dirasakan masyarakat hingga tingkat kelurahan. “Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, seraya mengapresiasi dukungan, pengawasan, kritik, dan saran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Yusran menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga filosofi Sara Pataunguna sebagai landasan persatuan dan kebersamaan. Ia menegaskan bahwa pembangunan bukan semata-mata hasil kerja wali kota dan wakil wali kota, melainkan buah kolaborasi pemerintah, DPRD, aparat sipil negara, TNI-Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga. Semangat tersebut diharapkan menjadi modal bersama untuk mewujudkan Baubau yang bangkit, berbudaya, dan sejahtera. (*)

Pemkab Buton Selatan Gunakan APBD untuk Membantu Kebutuhan Sekolah Anak Keluarga Miskin, La Bariu: Seragam hingga Tas Sekolah Segera Disalurkan

dengan daerah,” kata La Bariu saat menjelaskan mekanisme pengadaaan bantuan tersebut.

Program ini tidak mencakup seluruh sekolah secara otomatis. Dinas Pendidikan menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan keluarga siswa dan hasil usulan kepala sekolah. Seluruh sekolah tetap diminta mengajukan data, tetapi penetapan penerima mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing siswa.

La Bariu menegaskan, pendataan harus terus diperbaiki agar bantuan menjangkau anak-anak yang kondisi keluarganya paling rentan. Sekolah diminta kembali memperbarui data untuk kebutuhan program pada 2027, termasuk mengidentifikasi siswa yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua serta mereka yang

mengalami kesulitan ekonomi.

“Imbauan saya, sekolah-sekolah tetap mendata kembali untuk 2027, terutama siswa-siswa yang orang tuanya betul-betul mengalami kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Dalam penentuan penerima, data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menjadi salah satu acuan, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Menurut La Bariu, kepala sekolah dan pihak yang mengenal kehidupan masyarakat setempat memiliki posisi penting untuk membantu memastikan ketepatan sasaran.

Secara historis, perhatian terhadap akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin telah menjadi bagian dari kebijakan nasional, antara lain melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang diluncurkan pada 2014 untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga kurang

mampu tetap memperoleh layanan pendidikan. Di tingkat internasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat, juga menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua.

Melalui bantuan yang diibayai APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berupaya meringankan beban pengeluaran keluarga sekaligus mendukung kebutuhan dasar siswa. Ketepatan data, verifikasi kondisi keluarga, dan transparansi penetapan penerima menjadi faktor penting agar perlengkapan sekolah benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan. (*)

Baubau Job Fair 2026 Catat 325 Lamaran dalam Dua Hari, 16 Perusahaan Berpartisipasi, tersedia 737 Lowongan Kerja

perusahaan tersebut diikuti 15 perusahaan pada hari pertama dan 16 perusahaan pada hari kedua, berdasarkan laporan kegiatan yang dipublikasikan panitia.

Pada hari pertama, Senin (12/10/2026), panitia mencatat 145 pengunjung melakukan registrasi, sedangkan 130 orang mengisi kuesioner melalui pemindaian kode batang. Sebanyak lima orang mengurus Kartu Pencari Kerja atau AK1. Pada hari yang sama, terdapat 156 lamaran kerja yang masuk dari pencari kerja kepada perusahaan peserta.

Laporan hari kedua, Selasa (13/10/2026), menunjukkan

144 pengunjung melakukan registrasi dan 122 orang mengisi kuesioner. Sebanyak tiga orang mengurus AK1, sementara perusahaan peserta menerima 169 lamaran kerja. Dengan demikian, jumlah lamaran selama dua hari mencapai 325, atau bertambah 13 lamaran pada hari kedua dibandingkan hari pertama.

Selain membuka akses perekrutan, kegiatan ini menyediakan layanan pendukung bagi masyarakat. Pada hari pertama, tercatat tujuh penerima layanan bantuan sosial dan 61 penerima layanan kesehatan. Sementara itu, pada hari kedua, layanan bantuan sosial dimanfaatkan 33 orang dan layanan kesehatan diberikan kepada 75 orang. Tersedia pula satu layanan Nomor Induk Be-

rusaha (NIB) dan dua layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada hari kedua.

Dari sisi partisipasi dunia usaha, jumlah perusahaan meningkat dari 15 pada hari pertama menjadi 16 perusahaan pada hari kedua. Daftar lowongan yang dipublikasikan untuk keseluruhan kegiatan, 12-15 Oktober 2026, mencantumkan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 737 orang. Dari jumlah tersebut, 295 lowongan dikategorikan sebagai penempatan lokal di Baubau, sedangkan 442 lowongan ditujukan untuk penempatan luar negeri.

Penempatan luar negeri dalam daftar tersebut mencakup

Tinjau SD Negeri 1 Gu, Bupati Buton Tengah Dr Azhari Soroti Pemerataan Fasilitas Pendidikan, Apresiasi Dukungan Pusat untuk Revitalisasi 66 Sekolah

Dalam kunjungan tersebut, Azhari bersama rombongan juga berinteraksi langsung dengan para siswa. Peninjauan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat kondisi lingkungan sekolah sekaligus menegaskan pentingnya fasilitas belajar yang memadai dalam mendukung kegiatan pendidikan.

Program revitalisasi satuan pendidikan secara nasional merupakan bagian dari kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Kemendikdasmen mencatat, pada 2025 program tersebut menjangkau 16.167 satuan pendidikan berdasarkan data yang diumumkan kementerian pada Juni 2026. Pemerintah kemudian menyiapkan perluasan sasaran pada 2026 untuk menjangkau lebih banyak sekolah di berbagai daerah.

Secara internasional, pentingnya lingkungan belajar yang aman dan layak juga menjadi perhatian UNESCO melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 ten-

tang pendidikan berkualitas. Target 4.a menekankan perlunya pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender, inklusif, serta aman dan efektif bagi seluruh peserta didik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, revitalisasi sekolah diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga memperkuat kualitas layanan pendidikan. Azhari menempatkan pembenaan sarana pendidikan sebagai salah satu prioritas daerah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter dan peningkatan kemampuan siswa.

Pemerintah daerah berharap dukungan Kemendikdasmen dan BPMP Sultra dapat terus berlanjut sehingga pemerataan infrastruktur pendidikan semakin luas. Dengan alokasi revitalisasi bagi 66 sekolah pada 2026, Buton Tengah menargetkan tersedianya fasilitas belajar yang lebih memadai untuk mendukung lahirnya generasi berkarakter, berdayasaing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Apresiasi Warga Bone-Bone yang Konsisten Melestarikan Haroana Andala, Tradisi Pesisir Baubau yang Menjaga Warisan Leluhur

pada Rabu (14/10/2026). Menurut dia, tradisi tersebut mencerminkan hubungan erat masyarakat Bone-Bone dengan laut sebagai sumber penghidupan. Melalui ritual ini, warga mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt. atas rezeki yang diperoleh dari hasil laut.

“Atas nama Pemerintah Kota Baubau, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kelurahan Bone-Bone,” kata Yusran.

Selain menjadi ungkapan syukur, Haroana Andala juga mengandung doa dan harapan agar nelayan senantiasa memperoleh perlindungan ketika melaut. Ritual pelarungan bahtera Andala menjadi bagian penting dari tradisi tersebut, sekaligus merepresentasikan nilai spiritual dan kebersamaan yang diwariskan antargenerasi di lingkungan masyarakat pesisir.

Yusran mengingatkan bahwa keberlangsungan tradisi lokal membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Di tengah modernisasi dan perkembangan teknologi, pewarisan budaya dinilai penting agar masyarakat tidak kehilangan akar sejarah dan identitasnya. “Budaya adalah identitas kita, martabat daerah kita yang harus terus kita wariskan kepada generasi-generasi mendatang,” ujarnya.

Dalam konteks sejarah, tradisi seperti Haroana Andala memperli-

hatkan bagaimana masyarakat Indonesia mempertahankan pengetahuan, nilai, dan praktik budaya yang tumbuh dari lingkungan sosialnya. Secara nasional, pengakuan terhadap pentingnya warisan budaya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pada tingkat internasional, UNESCO mengadopsi Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda pada 2003 guna mendorong pelestarian tradisi lisan, ritual, seni pertunjukan, dan praktik budaya yang diwariskan antargenerasi.

Pemerintah Kota Baubau berkomitmen mendukung pelestarian sekaligus pengembangan Haroana Andala. Keunikan ritual pelarungan bahtera Andala dinilai berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya yang dapat memperkenalkan kekayaan tradisi lokal kepada pengunjung dari berbagai daerah maupun mancanegara.

Pengembangan wisata berbasis budaya tersebut diharapkan turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya warga pesisir Kelurahan Bone-Bone. Namun, upaya itu perlu tetap memperhatikan nilai, makna, dan tata cara adat agar pengembangan pariwisata tidak menghilangkan esensi ritual. Melalui Haroana Andala, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menjaga warisan leluhur sekaligus memperkuat identitas budaya Baubau. (*)

up 87 tenaga kerja untuk Malaysia, 180 untuk Taiwan, 50 untuk Hong Kong, dan 125 untuk Jepang. Adapun lowongan dalam negeri berasal dari berbagai sektor, antara lain perhotelan, kesehatan, perbankan, ritel, makanan dan minuman, serta jasa keuangan. Angka 737 merupakan total kebutuhan tenaga kerja yang diumumkan, bukan jumlah orang yang telah diterima bekerja.

Dinsosnaker Kota Baubau menjadi pihak yang relevan untuk menjelaskan tindak lanjut kegiatan, termasuk proses pencocokan pelamar dengan kebutuhan perusahaan, verifikasi lowongan, serta perlindungan calon pekerja yang berminat pada

penempatan luar negeri.

Secara historis, bursa kerja merupakan salah satu bentuk layanan perantara tenaga kerja yang berkembang di berbagai negara untuk mempertemukan pemberi kerja dengan pencari kerja. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang berdiri pada 1919, turut mendorong agenda ketenagakerjaan, kesempatan kerja yang layak, dan perlindungan pekerja. Dalam konteks Baubau, keberhasilan job fair tidak hanya diukur dari banyaknya pengunjung dan lamaran, tetapi juga dari transparansi proses seleksi, kesesuaian kompetensi, serta jumlah pencari kerja yang benar-benar memperoleh pekerjaan. (*)

Baubau Rayakan 485 Tahun, Amanat Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Singgung IPM 80,29 Yang Sangat Tinggi dan Investasi Rp139 Miliar Hingga Akses Teknologi Digital Jadi Modal Pembangunan

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memperkuat transformasi digital, mendorong investasi, dan menyiapkan pengusulan Benteng Keraton Buton sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO dalam momentum peringatan HUT Baubau ke-485 dan Hari Jadi Kota Baubau ke-25 sebagai daerah otonom, Sabtu (17/10/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kota yang berdaya saing tanpa meninggalkan akar sejarah Kesultanan Buton.

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim SE, dalam amanat upacara menegaskan bahwa pembangunan harus tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi dan dinamika kebijakan fiskal. “Peningkatan jalan, drainase, jaringan air bersih, hingga mutu pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas kerja,” ujarnya. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat menjaga kerukunan, merawat fasilitas publik, dan memperkuat gotong royong.

Pada sektor ekonomi, realisasi investasi Baubau sepanjang 2026 dilaporkan mencapai Rp139 miliar. Revitalisasi Pasar Wameo, penyiapan pasar penyangga, penyelenggaraan Baubau Expo, serta masuknya sejumlah pelaku usaha modern diharapkan membuka lapangan kerja dan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Baubau tercatat sebesar 80,29 pada akhir 2025, masuk kategori sangat tinggi. Kota ini juga disebut memperoleh peringkat kedua nasional dalam kategori akses dan pelayanan kesehatan Regional Sulawesi dari Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menghadapi perkembangan



Amanat Wali Kota Baubau H Yusran Fahim di HUT Baubau ke-485, Pemkot Bidik Warisan Dunia dan Perluas Akses Teknologi Digital Hingga IPM Tinggi dan Investasi Rp 139 Miliar

IPM 80,29

INVESTASI Rp139 MILIAR

AKSES TEKNOLOGI DIGITAL

BENTENG KERATON BUTON MENUJU UNESCO

teknologi, Pemkot Baubau menjalin kerja sama dengan Balai Besar Komdigi Makassar melalui kesepakatan pelatihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan penguatan konektivitas digital. Baubau juga menyatakan dukungan terhadap program strategis nasional, termasuk pengembangan Bandara Betoambari, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Di bidang kebu-

dayaan, pemerintah daerah menjadwalkan Simposium Budaya Buton pada 28 Oktober 2026 sebagai bagian dari persiapan teknis pengusulan Benteng Keraton Buton ke UNESCO. Upaya tersebut sejalan dengan pelestarian tradisi Santiago, karnaval budaya, dan Pekakande-kandea untuk menjaga warisan leluhur serta falsafah Sara Pata-anguna. “Identitas Baubau berakar kuat pada peradaban Kesultanan Buton dan falsafah Bolimo Karo Somanamo Lipu, yang mengutamakan

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” kata Yusran dalam amanatnya.

Secara historis, Baubau tumbuh dari lingkungan peradaban Kesultanan Buton yang memiliki tradisi pemerintahan, hukum adat, dan tata sosial tersendiri. Benteng Keraton Buton menjadi salah satu peninggalan penting dari perjalanan sejarah tersebut. Dalam konteks internasional, UNESCO melalui Konvensi Warisan Dunia 1972 menetapkan kerang-

ka kerja perlindungan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal luar biasa. Pengusulan ke daftar Warisan Dunia memerlukan kajian, dokumentasi, serta pemenuhan kriteria dan persyaratan UNESCO; karena itu, agenda simposium menjadi salah satu langkah persiapan, bukan penetapan status sebagai warisan dunia.

Peringatan yang berlangsung di Baubau tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Fasikin, S.Pi., M.Si., Bupati Buton Selatan H Muh

Adios, Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa ST, Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil, SH, MH, Wakil Bupati Buton Tengah Muh Adam Basan SSos., anggota DPR RI Jaelani, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya. Hadir pula Atase Kebudayaan Timor-Leste Prof Dr Tasrifin Tahara, Kepala BLSDM Komdigi Makassar Drs Baso Saleh, MIKom., dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara Andi Syahrir.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan ritual adat

Pekakande-kandea yang mencakup pemberian makanan kepada anak-anak maulu atau yatim piatu. Peringatan hari jadi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyeimbangkan modernisasi pelayanan publik, penguatan ekonomi, serta pelestarian identitas budaya. Dengan demikian, pembangunan Baubau tidak hanya diukur melalui capaian ekonomi dan teknologi, tetapi juga melalui kemampuan menjaga warisan sejarah untuk generasi mendatang.(*)